

BAB I PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Konferensi Asia-Afrika 1955, lebih lanjut ditulis Konferensi Bandung, adalah momen bersejarah dalam gerakan dekolonisasi paska Perang Dunia II. Konferensi Bandung digagas oleh lima negara, yaitu India, Pakistan, Ceylon (sekarang Sri Lanka), Burma, dan Indonesia. Konferensi ini diadakan di Bandung, Indonesia selama 18–24 April 1955 dan dihadiri oleh 29 negara bekas jajahan di wilayah Asia-Afrika. Konferensi Bandung menghasilkan berbagai aspirasi negara-negara bekas jajahan, yaitu anti-imperialisme, anti-kolonialisme, penentuan nasib sendiri, penghargaan terhadap hak asasi, perdamaian dunia, dan penguatan hubungan antar bangsa (KAA, 1955). Meskipun bukan menjadi konferensi internasional pertama yang membahas pengalaman rasial oleh kolonialisme Eropa, namun Konferensi Bandung menjadi momentum penting dalam perjuangan anti-kolonial masyarakat paska-perang. Pertemuan ini, dalam ungkapan Soekarno, merupakan “*konferensi internasional orang-orang kulit berwarna pertama di sejarah umat manusia*” (Soekarno, 1955).

Konferensi Bandung menjadi pertemuan bagi negara-negara yang baru merdeka, atau sedang dalam perjuangan kemerdekaan, untuk berdialog dan membayangkan tananan dunia paska-kolonial. Alih-alih tunduk terhadap ideologi Blok Barat maupun Blok Timur, Konferensi Bandung melahirkan pilihan lain. Yaitu,

pengecaman terhadap semua bentuk kolonialisme, baik yang datang dari Barat atau Timur, baik yang terus beroperasi dalam bentuk tradisionalnya maupun yang bermanuver dalam bentuk-bentuk lain; menjadi dekolonial (Mignolo, 2017). Konsensus ini menjadi warisan penting untuk upaya rekonstruksi paska periode panjang kolonialisme Eropa dan solidaritas Dunia Ketiga¹ dalam perjuangan anti-kolonial dan dekolonial.

Namun, realpolitik Konferensi Bandung tidak bertahan dan mengalami akhir yang tragis di periode 1965–1970-an ketika kematian pemimpin utamanya, Gamal Abdel Nasser dari Afrika dan Soekarno dari Asia. Perubahan radikal kemudian terjadi di wilayah Asia-Afrika, yaitu pergeseran orientasi politik yang mengarah ke Blok Barat–Indonesia di bawah rezim Orde Baru Soeharto dan Mesir di bawah Infatih Anwar Sadat (Khudori, 2018). Memasuki tahun 1980-an, kemenangan Amerika Serikat pada Perang Dingin serta globalisasi neoliberal yang digagas Thatcher dan Reagan kemudian berkembang menjadi kekuatan hegemon yang membentuk dunia unipolar dengan satu corak ekonomi tunggal kapitalisme–setidaknya hingga Krisis Finansial Global 2008 (Peters, 2022).

Akan tetapi, warisan Konferensi Bandung melampaui realpolitik dan peranan pemimpin-pemimpin negara yang semakin mengalami tensi perbedaan pada saat itu.

¹ Dunia Ketiga adalah gagasan solidaritas anti-kolonial warisan Konferensi Bandung, namun saat ini istilahnya digunakan untuk menunjukkan hierarki ekonomi, budaya, dan ideologi. Penggunaan istilah ini digunakan sesuai gagasan yang lahir dari Konferensi Bandung (lihat: Prashad, 2007; Mohanty, [2003]2022).

Bukan hanya melahirkan konsesus, Konferensi Bandung juga melahirkan ‘spirit’ yang menghubungkan solidaritas Dunia Ketiga dengan upaya melepaskan diri dari kekerasan kolonial dalam segala bentuk. Roeslan Abdulgani, Menteri Luar Negeri Indonesia saat itu yang juga merupakan Sekretaris Umum KAA, memperkenalkan istilah ‘spirit Bandung’ (Abdulgani, 1964). Yaitu, kualitas afektif dari kekuatan dekolonisasi Dunia Ketiga dan pembayangan tatanan dunia baru yang berkomitmen pada hak asasi manusia, penentuan nasib sendiri, dan perdamaian dunia (Isabella, 2022). Spirit Bandung tidak dilontarkan dengan makna yang definitif, melainkan sebuah kebajikan yang menghasilkan ‘perasaan kemungkinan politik’ dan ‘sentimen untuk masa depan baru’ bagi subjek paskakolonial (Lee, 2010).

Konferensi Bandung dan warisannya tentang ‘spirit’ menjadi lintasan terpenting dalam perjuangan dekolonisasi yang nyatanya tidak berhenti paska kemerdekaan negara-negara Dunia Ketiga di abad ke-20. Untuk betul-betul memahami warisan Konferensi Bandung, penting untuk mensituasikannya secara historis dan diskursif dalam konteks yang lebih besar tentang hierarki global di satu sisi dan urgensi dekolonisasi masyarakat global di sisi lainnya.

Abad ke-20 diyakini sebagai penanda berakhirnya kolonialisme, yaitu periode penguasaan *terra incognita* (tanah yang tidak diketahui) dan sumber daya di dalamnya melalui pemerintahan kolonial Eropa dan kelahiran sirkuit komersial Atlantik pada abad 16 (Mignolo, 2005). Namun, apa yang terjadi sebelum abad ke-20 tersebut bukan hanya eksploitasi di ranah ekonomi-politik, melainkan juga pada berbagai aspek

kehidupan kita, seperti rasial, gender, seksualitas, spiritual, kosmologi, pengetahuan, estetika, dst. Eksploitasi Eropa terhadap masyarakat non-Eropa ini melahirkan perbedaan kolonial yang nyatanya masih terus hidup paska dekolonisasi formal negara-negara jajahan abad ke-20 (Grosfoguel, 2006; Fanon, 2004; Mignolo dan Vazquez, 2013). Dekolonisasi formal tersebut tidak menghilangkan struktur kolonial yang terus hidup dalam aktivitas ekonomi-politik global, pola-pola budaya, kesadaran publik, hingga imaji diri di berbagai aspek kehidupan kita (Maldonado-Torres, 2007). Bahkan ketika kemenangan liberalisme dan kapitalisme paska Perang Dingin hadir dengan menjanjikan kemajuan, hak asasi, maupun demokrasi, perbedaan kolonial dalam tatanan dunia masih terus ada (Mignolo, 2010).

Laporan Brandt (1980) tentang isu pembangunan internasional menunjukkan adanya kesenjangan yang besar. Kesenjangan ini kemudian menggeser pembagian Barat–Timur menjadi Utara–Selatan berdasar PDB per kapita. Utara adalah negara-negara maju dan Selatan adalah negara-negara berkembang/miskin yang sebagian besarnya merupakan negara bekas jajahan. Laporan Brandt kemudian digunakan elit politik negara-negara maju untuk mengatur perekonomian Selatan dengan dukungan lembaga-lembaga dunia seperti Bank Dunia dan IMF (Jati, 2012). Misal, Program Penyesuaian Struktural (SAPs) di negara-negara Afrika, Asia, Amerika Latin, dan Karibia pada tahun 1980–1990-an yang meningkatkan ketergantungan negara berkembang/Selatan dengan pasar bebas dan menimbulkan masalah lanjutan (Ndlovu-Gatsheni, 2013). Namun, kategorisasi Utara/Selatan bukan hanya disebabkan oleh

kemampuan ekonomi negara. Terdapat hubungan eksploitasi yang terus mempertahankan kategorisasi tersebut, di mana Selatan menjadi wilayah tenaga kerja dan sumber daya untuk kebutuhan ekonomi Utara (Pardikar, 2020). Kategorisasi ini juga mengaburkan permasalahan di level komunitas di seluruh dunia, misal permasalahan imigran, rasisme, atau ketimpangan gender (UNU IIGH, 2024).

Krisis Finansial Global tahun 2008 kemudian menghasilkan pergeseran kekuatan ekonomi baru dari Selatan, seperti Belt and Road Initiatives (BRI) oleh Cina, Asia Infrastructure Investment Bank (AIIB) di Asia, dan New Development Bank (NDB) oleh negara-negara BRICS. Kekuatan-kekuatan ini merupakan kelanjutan dari cita-cita kerja sama ekonomi Dunia Ketiga yang digagas Konferensi Bandung, di hari ini dikenal dengan istilah Kerja sama Selatan-Selatan atau South-South Cooperation (SSC). Namun, kekuatan-kekuatan ini diukur dari indikator ekonomi dan geopolitik serta masih beroperasi dengan kerangka kapitalisme yang melandasi berbagai ketimpangan masyarakat global, seperti hierarki rasial, ketimpangan gender, krisis ekologi, dst. (Wijaya dan Jayasuriya, 2024; Peters, 2022).

Pandemi global Covid-19, gerakan Black Lives Matter, hingga solidaritas melawan kekerasan anti-Asia di kurun tahun 2020 telah menunjukkan bagaimana hierarki rasial sebagai warisan kolonialisme masih terus mewarnai kehidupan masyarakat dunia (Schachter, 2020). Adapun keberlanjutan genosida Israel atas Palestina paska serangan 7 Oktober 2023 menunjukkan urgensi untuk terus meretas struktur kolonial yang sejatinya masih hidup di tengah-tengah kita sembari menutupi

dirinya dengan retorika demokrasi, kebebasan, hak asasi manusia, kemajuan, keselamatan (Elhalaby, 2023). Oleh karenanya, penting untuk mengupayakan berbagai alternatif dalam perjuangan anti-kolonial dan solidaritas melawan imperialisme, kolonialisme, serta segala menuver bentuknya.

Pada titik ini, perjuangan anti-kolonial dapat dilakukan melalui aktivitas kesenian. Dunia seni adalah dunia yang selalu berkelindan dengan realitas sosial, politik, ekonomi, kultural masyarakat dan dinamika kuasa di antaranya (Bourdieu, 1983). Sejarah dan perkembangannya pun berjalan seiring misi kolonial, dimulai dari kelahiran museum modern hingga seni kontemporer di hari ini (Mignolo, 2005). Baik dari perannya dalam menciptakan kebudayaan Eurosentris, maupun kemampuannya dalam perjuangan anti-kolonial dan dekolonial (Tricontinental, 2020; Mulyono, 2022; Fraser, 2024;). Penelitian ini kemudian akan membahas pameran *documenta fifteen* pada tahun 2022. Khususnya tentang bagaimana *documenta fifteen* dapat menjadi lintasan penting lainnya dalam perjuangan anti-kolonial yang tidak berhenti paska dekolonisasi politik-legal formal abad 20.

*documenta fifteen*² adalah seri ke-15 *documenta* di Kassel, Jerman. *documenta* sendiri merupakan pameran seni internasional dan institusi kebudayaan Jerman yang lahir lima bulan paska Konferensi Bandung 1955, yaitu pada September 1955. Keduanya lahir dengan spirit rekonstruksi paska-perang. Jika Konferensi Bandung

² *documenta fifteen*, *documenta*, ruangrupa, lumbung ditulis dengan huruf awal kecil sesuai penamaan resminya (lihat: documenta.de, nd.).

lahir dari pengalaman masyarakat Dunia Ketiga, *documenta* lahir dengan tujuan merekonstruksi Jerman Barat paska kekejaman kultural Partai Nazi (NSDAP). Keduanya melahirkan gagasan yang menjadi warisan hingga hari ini. Yaitu, Konferensi Bandung dengan gagasan anti-kolonial dan spirit Bandung, *documenta* dengan gagasan seni yang universal ala Amerika Serikat dan perannya dalam mempromosikan cara hidup Barat (Grasskamp, 2017; Buurman, 2021). Keduanya juga memiliki signifikansi terhadap konteks geopolitik kelahirannya, Konferensi Bandung sebagai ideasi solidaritas Dunia Ketiga, *documenta* sebagai ‘senjata perang dingin’ melawan komunisme Timur di konteks kultural (Buurman, 2022; Cockcroft, 1974). Dan jika realpolitik Konferensi Bandung mengalami akhir yang tragis di tahun 1965–1970-an, *documenta* terus berkembang seiring kritik yang mendorong kehadiran pandangan lain di luar pengalaman Euro-Amerika (Hidayatullah, 2024).

documenta fifteen pada tahun 2022 didireksi oleh kolektif seni asal Indonesia, ruangrupa. Pada *documenta fifteen*, ruangrupa membawa cara kerja kolektif, yaitu cara kerja berkesenian hingga aktivisme yang khas di Indonesia. Karakteristik kolektif melekat pada prinsip situs-spesifik, lokalitas, non-hierarkis, produksi pengetahuan dan narasi alternatif, jaringan pertemanan dan solidaritas, hingga aktivisme kebudayaan (Rinoza, 2021; Siregar, 2021; Juliastuti, 2022). Kolektif dalam *documenta fifteen* didasari pada nilai-nilai lumbung. Lumbung adalah arsitektur komunal dan pengetahuan lokal masyarakat agrikultur, di mana surplus hasil panen masyarakat dikumpulkan dan didistribusikan untuk kebutuhan bersama. Praktik lumbung,

sebagaimana ruangrupa menyebutnya, memberi tawaran mengenai ekonomi kolektivitas, penciptaan sumber daya bersama dan distribusi yang adil. *documenta fifteen* bermaksud mengangkat berbagai upaya ‘menyembuhkan’ luka-luka hari ini yang berakar pada kolonialisme, kapitalisme, patriarki, dan operasi kuasa lainnya (ruangrupa, 2019). *documenta fifteen* turut mengundang berbagai seniman dan kolektif dari Selatan dengan cerita dan gagasan berdasar konteks spasial-kultural beragam (Rostkowska dan Bellinetti, 2022; Morgner, 2020).

Konferensi Bandung 1955 menjadi momentum masyarakat paskakolonial untuk berdialog dan merumuskan utopia radikal tentang dunia yang merdeka. Di sisi lain, pertemuan dunia (seni) Barat dengan dunia (seni) Selatan pada *documenta fifteen* turut membuka dialog dalam membayangkan dunia yang lebih baik di tengah struktur kerentanan akibat luka-luka kolonial dan berbagai krisis kontemporer. Berikutnya penelitian ini akan membahas bagaimana dekolonisasi di berbagai lini sebagai warisan Konferensi Bandung 1955 dapat diupayakan melalui aktivitas kesenian, yaitu pameran *documenta fifteen*.

“Izinkan saya memulai dengan komentar singkat tentang sejarah. Pada tahun 1955, Arnold Bode mendirikan documenta di Kassel, Jerman, untuk menyembuhkan luka-luka Perang Dunia Kedua. Beberapa bulan sebelumnya, pada tahun yang sama, sekelompok pemimpin secara kolektif meletakkan dasar bagi apa yang akan dikenal sebagai Gerakan Non-Blok, di Bandung, Indonesia, membahas jalan ke depan yang independen dari dan dibangun di atas luka-luka kekuatan kolonial. Saya merasa perlu menceritakan kembali fakta-fakta ini karena sejarah dapat menunjukkan kepada kita bagaimana dunia membayangkan cara menangani kekejaman dan luka mendalam pada saat yang sama tetapi dengan cara yang berbeda.”

- Ade Darmawan (ruangrupa) di Parlemen Jerman, 6 Juli 2022³

1.2.Rumusan Masalah

Penelitian ini akan menganalisis pameran *documenta fifteen* yang didireksi oleh ruangrupa. Rumusan masalah penelitian ini adalah: **“bagaimana pameran *documenta fifteen* dapat menjadi upaya dekolonisasi sebagai warisan Konferensi Bandung 1955?”**

1.3.Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini terbagi ke dua bagian, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus seperti yang akan dijelaskan pada subbab berikut ini.

1.3.1. Tujuan Umum

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana pameran *documenta fifteen* berperan dalam upaya dekolonisasi yang meneruskan warisan Konferensi Bandung tentang solidaritas Dunia Ketiga.

1.3.2. Tujuan Khusus

Dengan memfokuskan pada perjuangan anti-kolonial dan dekolonial melalui aktivitas kesenian, yaitu pameran *documenta fifteen*, penelitian ini

³ Paragraf ini adalah kalimat pembuka pidato Ade Darmawan, perwakilan ruangrupa, di Parlemen Jerman paska menguaknya isu anti-semit di *documenta fifteen*. Penelitian ini tidak secara spesifik membahas mengenai isu ini, namun terdapat irisan-irisan penting yang akan dibahas lebih lanjut.

bertujuan untuk menggambarkan keberlanjutan struktur kolonial yang masih hidup hingga hari ini. Dengan menarik analisisnya ke pameran, kelompok masyarakat seperti seniman dan kolektif, serta hubungannya dengan warisan sejarah anti-kolonial, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pengamatan alternatif dalam memahami politik internasional.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi di ranah akademis maupun praktis yang akan dijabarkan pada subbab berikut ini.

1.4.1. Manfaat Akademis

Pada ranah akademis, penelitian ini diharapkan memperkaya perspektif bagi kajian politik internasional, globalisasi, transnasionalisme, maupun budaya dalam Hubungan Internasional.

1.4.2. Manfaat Praktis

Pada ranah praktis, penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan kepada pekerja artistik, kolektif, dan kelompok masyarakat lain yang melakukan kerja-kerja dekolonial hari ini. Apa yang tertulis dalam penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan agensi yang dimiliki oleh kelompok masyarakat ini di tengah struktur kerentanan yang menghubungkan masyarakat dunia.

1.5. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka ini akan membahas tentang pustaka-pustaka yang menjadi rujukan dan keterkaitannya dalam penelitian. Berikutnya, peneliti akan mencari celah (*gap*) penelitian yang menjadi ruang eksplorasi penelitian ini.

Pustaka pertama adalah tulisan Brigitta Isabella (2022) yang berjudul *“Rewriting Solidarities in Juxtaposition: The Poetic and the Chronopolitics of Bandung”*. Pustaka ini membahas tentang warisan sejarah Konferensi Bandung 1955 untuk merebut kembali puisi antikolonial dan solidaritas transnasional dari Spirit Bandung melalui perspektif kelas dan gender. Dengan menjukstaposisikan dua peristiwa berbeda, yaitu Konferensi Bandung 1955 dan perjuangan antikolonial saat ini, tulisan ini menghasilkan “Bandung chronopolitics”. Yaitu, politik waktu postkolonial yang memanggil keterikatan antara peristiwa sejarah (melalui puisi *Kepada Sahabat Asia-Afrika* (1961) karya Sugiarti Siswadi) dan perjuangan antikolonial saat ini (melalui puisi *Seusai Badai Berpeluk Puisi* (2009) karya Mega Vristian). Jukstaposisi puisi dan Bandung *chronopolitics* menjadi strategi diskursif untuk mengubah Spirit Bandung menjadi imajinasi politik yang membawa kedalaman sejarah pada karya solidaritas Dunia Ketiga dalam upaya melawan kapitalisme imperial global. Tulisan ini relevan dalam melihat Konferensi Bandung 1955 sebagai warisan yang tidak berhenti di ‘keberhentian’ realpolitiknya di periode 1965-1970-an, melainkan imajinasi politik yang terus hidup dan dapat dibayangkan kembali untuk keberlanjutan solidaritas global dekolonial. Karena pustaka ini berfokus pada analisis

literatur, penelitian ini akan menempatkan warisan Konferensi Bandung dalam ranah yang lebih praktikal. Yaitu, analisisnya di disiplin Hubungan Internasional yang meninjau keberlanjutan solidaritas anti-kolonial dan dekolonial paska periode dekolonisasi politik-legal formal.

Pustaka kedua adalah tulisan Sylvester (2009) yang berjudul *Art/Museums: International Relations Where We Least Expect It*. Menindaklanjuti relevansi pustaka sebelumnya tentang Konferensi Bandung, pustaka kedua ini dijadikan tinjauan lain untuk mengaitkan bagaimana seni sejatinya juga merupakan bagian dari hubungan internasional, namun “*tidak diklaim sebagai bonafid tradisional dalam hubungan internasional*”. Tulisan ini menyoroti tentang seni/museum sebagai institusi yang sangat politis, rumit dan multivalen, terlibat atau berimplikasi dalam hubungan internasional, serta paham tentang kekuasaan. Namun, tulisan ini masih berfokus pada analisis seni/museum dalam logika negara/bangsa Westphalian, seperti seni sebagai aktivitas diplomasi, pertukaran budaya antar negara maupun non-negara, atau analisis representasi dan identitas nasional/internasional. Meskipun mengakui bahwa seni/museum adalah produk dunia Barat dan berperan dalam memproduksi modernitas, namun tulisan ini belum menyertakan analisis mengenai struktur kolonial yang masih terus beroperasi hingga hari ini.

Dengan demikian, tinjauan mengenai seni/museum dalam hubungan internasional juga merujuk ke tulisan Tidy dan Turner (2020) yang berjudul “*The Intimate Relations of Museum: a Method*”. Tulisan ini menjelaskan tentang museum

sebagai situs hubungan internasional yang intim dan diproduksi secara kolonial. Meskipun berfokus pada problematisasi museum, namun temuan penelitian ini dapat diaplikasikan pada bidang seni karena kesamaannya dalam mempertunjukkan hubungan sosial-politik dengan objek-objek. Museum dilihat sebagai situs pertemuan intim antara orang-orang, objek, institusi, diri, dan orang lain dalam politik internasional. Eksplorasinya menunjukkan bagaimana pameran museum tertentu, studi kasusnya yaitu British Army Royal Engineers, berfungsi sebagai ‘objek pengorganisasian’ yang intim. Pengorganisasian ini telah menghubungkan koleksi museum dengan kesadaran pengunjung, sekaligus mengecualikan pihak lainnya pada sirkulasi intim kekerasan imperial dan kolonial. Keintiman kemudian dibaca sebagai pengaruh sosio-seksual, skala dan kedekatan, serta diferensiasi atau rasialisasi kolonial.

Dengan menelusuri pengaturan institusi, pendekatan kurasi, pameran, serta intimasi, emosi, perasaan, dan pengalaman pengunjung, Tidy dan Turner memberi dua tawaran penting. Yaitu a) perluasan analisis HI mengenai museum dan pameran sebagai situs sehari-hari di mana kekerasan kolonial, rasial, dan imperial beroperasi, dan b) pendekatan keintiman sebagai metode dalam analisis hubungan internasional yang menganggap serius konstitusi kolonial tentang global/lokal. Metode keintiman yang berangkat dari proyek feminis, kiwari (*queer*), poskolonial, dan dekolonial, menjadi cara dalam memahami hubungan fisik-emosional antara orang-orang, objek, dan dinamika kekuasaan kolonial. Penelidikan museum sebagai situs-spesifik (*site-specific*), alih-alih situs terberi (*state-centric*), memberikan perhatian pada

posisionalitas dan etika peneliti dalam HI. Tulisan ini memberi poin penting mengenai posisionalitas dalam penelitian yang mengakui keberadaan politik inklusi, keterlibatan, atau eksklusi pada hubungan kolonial yang terus beroperasi. Sebab pustaka ini masih berfokus pada museum, penelitian ini akan lebih mengeksplorasi analisisnya ke konteks seni, yaitu pameran internasional *documenta*.

Pustaka berikutnya adalah tulisan Utama (2021) yang berjudul “*Continuing Bandung Legacy: Equator Project, the Solidarity of the South, and a Lookback on Today’s Cultural Works*” yang membahas tentang Biennale Jogja - Equator sebagai pameran seni yang bertujuan untuk melanjutkan warisan Konferensi Bandung. Tulisan ini juga menyoroti peran seni dalam mendorong transformasi sosial dan membangun kesadaran kolektif. Dalam konteks Biennale Jogja - Equator, seni tidak hanya dilihat sebagai produk estetika, tetapi juga sebagai alat pembebasan dari dominasi epistemik dan narasi kolonial. Pendekatan berbasis komunitas dan kolektif memungkinkan pengakuan terhadap suara-suara yang sebelumnya terpinggirkan, menciptakan ruang dialog yang lebih setara. Namun, tulisan ini tidak mengaitkan secara langsung antara prinsip-prinsip Konferensi Bandung dengan konteks seni dari negara Barat yang memiliki pengalaman historis-kultural-politik dan estetika berbeda. Oleh karenanya, penelitian ini akan menarik analisisnya ke kasus *documenta fifteen* dan meninjau spirit anti-kolonial dan dekolonial yang selaras dengan warisan Konferensi Bandung.

Pustaka terakhir adalah tulisan Alia Swastika (2022) yang berjudul “*documenta fifteen: Dreaming of a New Cartography*”. Pustaka ini berisi tentang keberjalanan

documenta fifteen sembari menjelaskan kembali sejarah panjang *documenta* sebagai institusi kebudayaan Barat. Dalam pustaka ini, terdapat argumen penting mengenai “*documenta fifteen bisa jadi merupakan tonggak panjang perjuangan untuk membayangkan kembali tatanan dunia baru paska Konferensi Bandung 1955*”. Akan tetapi, tulisan ini tidak membahas secara spesifik bagaimana *documenta fifteen* bisa menjadi ‘tonggak panjang’ perjuangan anti-kolonial dan dekolonial tersebut. Berikutnya, penelitian ini akan secara spesifik menganalisis *documenta fifteen* sebagai upaya dekolonisasi untuk perjuangan anti-kolonial dan dekolonial warisan Konferensi Bandung 1955. Sebab Konferensi Bandung merupakan lintasan terpenting dalam ‘titik balik dekolonial’, tulisan ini akan menggunakan teori dekolonilitas dan konsep-konsep yang mendukung untuk membuktikan bahwa *documenta fifteen* merupakan upaya dekolonisasi yang selaras dengan warisan anti-kolonial dan dekolonial dalam spirit Bandung.

1.6.Kerangka Pemikiran Teoritik

Paska Perang Dunia II, terjadi pergeseran kekuatan geopolitik dan kemunculan gerakan revolusioner anti-kolonialisme dan anti-imperialisme. Meskipun periode tersebut menandai dekolonisasi politik-legal formal, namun kolonisasi pada dimensi lain masih terjadi. Khususnya dalam ranah produksi pengetahuan, sentralitas Barat atau Eurosentrisme masih mendominasi.

Historiografi Eropa menegaskan kemampuannya dalam menyelesaikan persoalan dasar kehidupan politik, membina bangsa dan kebangsaan yang bersatu, dan pembangunan ekonomi yang menyejahterakan rakyatnya. Misal, konflik antar Raja dengan rakyatnya diselesaikan melalui Magna Charta (1215), persoalan hubungan antar-negara disepakati dalam Perjanjian Westphalia (1648), masalah ekonomi diselesaikan melalui Revolusi Industri (mulai di Inggris tahun 1760-an), pun ketika pertumbuhan ekonomi tersebut menimbulkan persoalan sosial, *Welfare State* pada abad ke-20 menjadi solusi atas persoalan tersebut. Namun, ada yang hilang dalam historiografi tersebut. Yaitu, sejarah kolonialisme dan imperialisme Eropa terhadap bangsa-bangsa di belahan dunia lain sesudah tahun 1492, ketika Eropa bertemu dengan kehidupan non-Eropa (Mignolo, 2011a).

Di sisi lain, terdapat konsep universalisme yang melekat dalam gagasan peradaban Eropa. Pada konteks pengetahuan, terdapat asumsi bahwa ada kebenaran ilmiah yang berlaku universal, di sepanjang waktu dan di semua ruang, serta keyakinan bahwa kehidupan dunia ini diatur oleh hukum deterministik dengan wujudnya yang linear–terus berkembang, maju, baru sesuai aturan-aturan ilmiah yang diverifikasi bersama. Implikasinya, ilmu sosial dianggap mampu menjadi ilmu yang tidak terikat dengan nilai-nilai tertentu, melainkan operasi untuk mencari kebenaran tunggal. Pribadi peneliti menjadi lepas dari apa yang ditelitinya (*value-free*), menghilangkan posisionalitas peneliti yang dibentuk oleh pengalaman ruang-waktu beragam. Namun, konsep universalisme ini sejatinya berangkat dari pengalaman ruang-waktu yang

spesifik, yaitu ketika Eropa mengalami transformasi ekonomi dan epistemik sejak Renaisans (Mas'oed, 2024).

Disiplin ilmu HI kemudian lahir dari Perjanjian Westphalia (1648) dan diproyeksikan secara universal serta melahirkan masyarakat 'internasional' yang terdiri dari negara-bangsa modern. Namun, kelahiran HI yang berdasar logika Westphalia telah mengaburkan perbedaan antara 'negara' dan 'bangsa', di mana 'negara' merujuk pada entitas politik dengan batas-batas teritorial yang jelas dan 'bangsa' merujuk pada identitas budaya, etnis, atau kelompok sosial. Akibatnya, disiplin HI memfokuskan analisisnya pada aktor negara-bangsa modern dan dinamika di antara mereka, namun tidak dengan hubungan-hubungan lain di luar itu, seperti dimensi identitas dan kultural yang sangat dipengaruhi oleh geo- dan politik tubuh yang membentuknya (Agnew, 1994; Larkins, 2010; Fanon, 1952 dalam Mignolo, 2011b). Pelibatan aktor non-negara pun seringkali diakui ketika ia secara langsung berhadapan dengan aktor negara, misal Transnational Activism Network (TAN) atau Transnational Social Movements (TSM) (Julinanda, 2021).

Pada titik ini, dekolonisasi disiplin ilmu HI menjadi penting sebab studi ini berkembang dari pengalaman politik masyarakat Eropa, juga bekas koloninya di Amerika Utara, dan kehadiran perspektif non-Eropa masih sukar ditemui. Mas'oed (2024) memberi dua tawaran strategi dekolonisasi studi HI, yaitu a) memikirkan kembali asal-usul tatanan dunia modern dan b) menggeser pusat perhatian studi Hubungan Internasional. Kedua strategi ini berarti membaca kembali pengertian

‘internasional’ dan menyadari kelemahan epistemologi dan metodologi yang mengandalkan pengalaman Barat, khususnya Eropa dan Amerika Utara.

Penelitian ini sendiri akan menggeser perhatian aktor, institusi, dan hubungan di antaranya dari pemusatan negara (*state-centric*). Yaitu, bagaimana hubungan seniman dan kolektif (juga kehadiran aktor-aktor negara maupun imajinasi kebangsaan lainnya) di sebuah pameran dapat menjadi praktik dalam mengupayakan dekolonisasi akibat sejarah panjang pengalaman kolonial masyarakat dunia. Oleh karenanya, teori dekolonial akan menjadi kerangka analisis dalam penelitian ini.

Teori dekolonial merupakan perluasan teori *world-system* yang dipelopori oleh Immanuel Wellerstain (1974). Berbeda dengan teori *world-system* yang berbicara tentang kategorisasi pusat-pinggiran pada ranah ekonomi-politik, teori dekolonial memperluas pemikirannya ke ranah kultural-pengetahuan-subjektivitas. Berikut kerangka pemikiran teori dekolonial yang digunakan dalam penelitian.

1.6.1.Modernity/Coloniality/Decoloniality (MCD)

Pemikiran ini dipelopori oleh Anibal Quijano (1992) dan dikembangkan oleh kolektif studi Grupo Modernidad/Colonialidad ke dalam teori Modernity/Coloniality/Decoloniality (selanjutnya ditulis MCD). Sederhananya, MCD menjelaskan tentang struktur kolonial yang masih terus beroperasi sejak periode kemerdekaan negara Dunia Ketiga. Struktur kolonial ini juga sudah hidup bahkan ketika kolonialisme belum melakukan ekspansi skalanya yang mencakup seluruh belahan dunia. Struktur kolonial ini tidak hanya dalam aspek yang terlihat seperti

geopolitik dan ekonomi, tetapi pada bentuk-bentuk lain yang sejatinya sudah ada sejak lama; pembedaan hierarkis pada pengetahuan, subjektivitas, gender, ras, spiritual (agama), alam, dst. Karenanya, dekolonisasi di berbagai bidang perlu dilakukan. Untuk melakukan dekolonisasi, menyadari bahwa masih ada struktur kolonial, disebut kolonialitas, yang tak pernah usai dalam gagasan kehidupan modern kita, disebut modernitas, untuk kemudian membayangkan cara-cara lain yang tidak mereproduksinya (Mas'oed, 2024).

MCD menjelaskan bahwa 'modernitas' adalah retorika keselamatan, kebaruan, dan kemajuan yang lahir dari konsepsi Eropa namun diproyeksikan secara universal ke seluruh kebudayaan, umumnya tertuang dalam agenda kemajuan teknologi, peningkatan produktivitas, dan keyakinan akan kemajuan (ruang-waktu yang linear). Namun, terdapat sisi gelap yang tak terpisahkan dari gagasan ini, yaitu proses eksklusi terhadap cara-cara hidup dan pengetahuan di luar Eropa. Proses eksklusi ini disebut kolonialitas, di mana Eropa menciptakan konsep rasial yang kemudian membedakan antara siapa yang 'beradab (*civilized*)' dan lainnya yang 'tidak beradab (*uncivilized others*)' sehingga diperlukan misi peradaban Eropa untuk masyarakat yang lebih maju, selamat, sejahtera. Dengan cara ini, terbentuklah hegemoni Barat atas yang lain dengan dikotomi beradab/barbarik, modern/tradisional, maju/terbelakang, superior/inferior dan mengenyampingkan keyakinan bahwa terdapat produsen modernitas lain di luar Barat (Mignolo, 2011a; Mas'oed, 2024).

Gagasan modernitas lahir dari revolusi ekonomi dan pengetahuan Eropa pada abad ke 16–17, yaitu ketika lahir sirkuit komersial di Laut Atlantik paska ‘penemuan’ Amerika oleh bangsa Eropa dan ketika transformasi besar-besaran ilmu pengetahuan, seni, dan filsafat yang menempatkan rasionalitas sebagai inti kebenaran. Pada titik ini, kolonialitas lahir dan menjadi sisi gelap masyarakat ‘modern’ yang seringkali terabaikan dari narasi besar modernisasi, pembangunan, industrialisasi.

Kolonialitas lahir dari penaklukan Amerika oleh orang-orang Eropa. Apa yang hadir di Amerika saat itu bukan hanya sistem ekonomi tentang akumulasi kekayaan negara melalui perdagangan internasional, tetapi “*kelindan struktur kuasa yang lebih luas dan lebar, yaitu eropa/kapitalis/militer/kristian/patriarkal/kulit putih/heteroseksual/lelaki*” (Grasfoguel, 2007). Periode ini tidak dapat dipisahkan dari pengalaman rasialisasi dan eksploitasi kapitalis, misal dari pembentukan hukum internasional untuk mengatur masyarakat suku Indian yang dianggap barbarik dan perdagangan budak Afrika besar-besaran untuk menunjang aktivitas komersial Atlantik. Atau operasi institusi seperti universitas dan museum yang melahirkan tradisi Eropa dan membentuk pengetahuan tentang tradisi non-Eropa berdasar lensa rasial dan patriarkal Barat (Lugones, 2010; Mignolo, 2011a). Kolonialitas terus berkembang seiring perkembangan modernitas. Grosfoguel (2006) merangkum kelindan struktur modernitas/kolonialitas ini ke dalam beberapa poin, yaitu:

1. Pembagian kerja internasional antara pusat dan pinggiran, di mana kapital mengorganisir tenaga kerja di pinggiran dengan bentuk-bentuk yang dipaksakan dan otoriter (lihat: Wallerstein, 1974)
2. Sistem antar-negara yang bersifat organisasi politik-militer dan dikontrol oleh lelaki Eropa dan diinstitusionalisasikan dalam pemerintahan kolonial (lihat: Wallerstein, 1979)
3. Hierarki rasial/etnik global yang mengutamakan orang-orang Eropa dibanding non-Eropa (lihat: Quijano, 1993; 2000)
4. Hierarki gender global yang mengutamakan lelaki dibanding perempuan dan patriarki Eropa dibanding bentuk-bentuk relasi gender lainnya (lihat: Spivak, 1988; Enloe, 1990)
5. Hierarki seksual yang mengutamakan heteroseksual dibanding homoseksual dan lesbian, hal ini berkaitan dengan bagaimana sebagian besar masyarakat adat di Amerika tidak menganggap homoseksualitas sebagai perilaku patologis dan tidak memiliki ideologi homofobik (Grosfoguel, 2006)
6. Hierarki spiritual yang mengutamakan Kristian dan dilembagakan dalam globalisasi gereja Kristen
7. Hierarki epistemik yang mengutamakan pengetahuan dan kosmologi Barat dibanding pengetahuan dan kosmologi non-Barat, hierarki epistemik ini terinstitusionalisasi pada sistem universitas global (lihat: Mignolo, 1995; 2000; Quijano, 1991)

8. Hierarki linguistik antara bahasa Eropa dan bahasa non-Eropa. Hierarki ini mengutamakan komunikasi dan produksi pengetahuan atau teori oleh bahasa-bahasa Eropa dan mensubalternisasi non-Eropa sebagai penghasil cerita rakyat atau budaya, namun bukan penghasil pengetahuan atau teori (lihat: Mignolo, 2000)
9. Hierarki estetika modern Barat yang lahir dari pengalaman dan sejarah lokal Eropa sebagai standar universal tentang apa yang dianggap indah dan bernilai dalam seni (lihat: Mignolo dan Vazquez, 2013)
10. Kategorisasi manusia (*human*, pemilik rasio) dan alam (*nature*, pihak lain) sehingga menyingkirkan kosmologi masyarakat adat di luar Euro dan Anglo-Amerika yang tak memisahkan alam-manusia dan menjadikan kontrol eksploitasi terhadap alam sah (lihat: Descola, 2013)

Kolonialitas terus berkembang melalui beberapa fase modernitas. Dalam beberapa kasus, modernitas bekerja melalui penjajahan, seperti kolonialitas pada masa kolonialisme Eropa atau kolonialitas pada *settler-colonialism* Israel. Dalam kasus lain, modernitas bekerja melalui manipulasi diplomatik dan komersial seperti, Perang Opium hingga rezim Mao Ze-dong di Cina, pengambilalihan kepemimpinan Inggris dan Prancis oleh Amerika Serikat dan mulainya proyek ekonomi global atas nama ‘pembangunan dan modernisasi’, atau globalisasi neoliberal dari Reagan dan Thatcher hingga runtuhnya pemerintahan Bush (Mignolo, 2011a).

Berikutnya, teori ini melayangkan kebutuhan dekolonisasi yang tidak hanya terbatas pada ranah politik-legal formal. Seperti kemerdekaan Asia-Afrika abad ke-20

yang sudah lepas dari negara penjajah, namun praktik eksploitasi, eksklusi, korupsi, pemaksaan cara-cara hidup dan berpikir masih terus menghantui, khususnya bagi mereka yang berada di Dunia Ketiga. Dekolonisasi dalam MCD lebih tepat disebut sebagai dekolonialitas, yaitu spektrum untuk mendekolonisasi kolonialitas yang menjangkiti dan saling terhubung di berbagai aspek kehidupan.

Dekolonialitas berkaitan dengan konsep pendahulunya, yaitu dewesternisasi. Dewesternisasi ditandai dengan kemunculan kekuatan-kekuatan baru seperti BRICS, BRI, atau AIIB, yang menggeser unipolaritas Amerika Serikat. Namun, kekuatan-kekuatan ini masih beroperasi dengan kerangka kerja kapitalisme. Penting untuk kembali melihat bahwa kapitalisme adalah inovasi Eropa, sehingga dewesternisasi belum menjangkau kebutuhan untuk mendekolonisasi kolonialitas. Dengan demikian, dekolonialitas adalah konsep tentang upaya untuk melepaskan diri dari kolonialitas. Dekolonialitas dilakukan dengan menghadirkan alternatif, pembayangan kembali, kehadiran kembali subjek dan pengetahuan yang telah tereksklusi dari pengalaman Barat yang telah membentuk kolonialitas. Kehadiran kembali ini bertujuan untuk melahirkan ‘kebenaran pluriversal’, bukan kebenaran universal, yaitu logika bahwa ada banyak realitas beragam yang hidup berdampingan (Mignolo, 2010).

Teori MCD digunakan untuk melihat bagaimana struktur dunia bekerja sehingga membentuk tatanan yang hierarkis seperti dijelaskan sebelumnya. Variabel-variabel penelitian, sebagai subjek asli dalam suatu realitas, hidup di dalam struktur ini. Seperti warisan Konferensi Bandung tentang solidaritas anti-kolonial dan dekolonial Dunia Ketiga, namun kemudian maknanya diada-adakan untuk

menunjukkan hierarki politik, ekonomi, budaya antara Dunia Pertama (Barat/Utara) dan Dunia Ketiga (Timur/Selatan). Atau aktivitas kesenian yang selalu berkelindan dengan operasi modernitas/kolonialitas sehingga upaya dekolonisasi dari/melalui kesenian menjadi relevan. Berikutnya, akan dibahas mengenai konsep-konsep yang digunakan sebagai analisis penelitian ini.

1.7.Operasionalisasi Konsep

1.7.1. Definisi Konseptual

1.7.1.1. Kolonialitas

Quijano (1992) dan Mignolo (2007) menjelaskan bahwa kolonialitas berbeda dengan kolonialisme. Kolonialisme merujuk pada pelaksanaan kuasa politik-ekonomi di dunia kolonial sehingga memunculkan bentuk imperial, sedangkan kolonialitas adalah suatu matriks kuasa kolonial yang saling terhubung (*colonial matrix of power*). Kolonialitas merupakan sistem kuasa yang mendefinisikan kultur, tenaga kerja, hubungan intersubjektivitas, dan produksi pengetahuan yang tidak berhenti ketika berakhirnya kolonialisme. Kolonialitas meliputi beberapa domain, seperti:

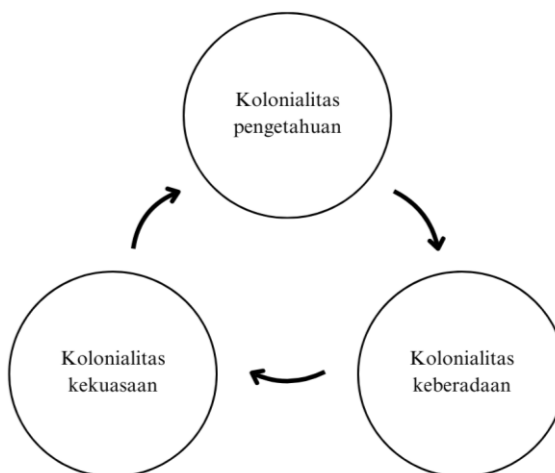
1. Kontrol subjektivitas: misal pendidikan Kristen dan sekuler yang berkembang jadi misi peradaban imperial/kolonial sebelum abad 20, museum, universitas, media, periklanan, dst.

2. Kontrol otoritas: misal pimpinan negara bagian di Amerika, otoritas Inggris di India, tentara AS, Biro Politik di Uni Soviet, dst.
3. Kontrol ekonomi: misal investasi surplus dari perampasan tanah Amerika dan Afrika, eksploitasi tenaga kerja besar-besaran yang dimulai dengan perdagangan budak, pembagian kerja internasional, hubungan utang luar negeri dari organisasi internasional di bidang ekonomi seperti Bank Dunia dan IMF, dst.
4. Kontrol pengetahuan: misal teologi dan penemuan hukum internasional yang membentuk tatanan pengetahuan geopolitik berdasar pengalaman Eropa yang lebih unggul terhadap standar pengetahuan dan estetika non-Eropa, dst.
5. Kontrol gender dan seksualitas: misal patriarki Eropa atau heteronormativitas

Domain-domain tersebut saling berkaitan dan disatukan oleh dua jangkar pertanyaannya: ‘siapakah agen dan institusi apakah yang menghasilkan serta terus mereproduksi kolonialitas?’ (Mignolo, 2011b). Agen dan institusi ini biasanya meliputi korporasi, negara-bangsa industrial, museum, universitas, gereja (Mignolo dan Vanquez, 2013). Struktur kuasa ini dipertahankan melalui performa akademik, pola-pola budaya, kesadaran publik, imaji diri, aspirasi diri, dan dalam aspek pengalaman modern kita (Maldonado-Torres 2007).

Grasfoguel (2007) menggambarkan matriks kolonialitas Quijano (2000a) dan Mignolo (1995) ke dalam suatu model yang saling berkaitan, meliputi:

1. Kolonialitas kekuasaan: merujuk pada konstruksi politik-global hingga menjadi struktur kekuasaan modern yang rasial hierarkis, Euroamerikasentris, patriarkal, kapitalis, hegemonik, dan asimetris.
2. Kolonialitas pengetahuan: merujuk pada sistem pengetahuan Barat yang menempatkan sistem non-Barat pada wilayah sang Liyan (*the Other*).
3. Kolonialitas keberadaan: merujuk pada dampak kolonisasi yang tidak hanya terkait aspek kekuasaan/ekonomi/pengetahuan, tetapi juga pemahaman tentang keberadaan/subjektivitas



Gambar 1.1 Model Kolonialitas oleh Grasfoguel (2007)

Sumber: adaptasi Mas'ood (2024), "Dekolonisasi Studi Hubungan Internasional", IIS Research Monograph, 6, IIS.

1.7.1.2. **Border Thinking**

Border thinking pertama kali diperkenalkan oleh Anzaldua (1987) dan dikembangkan ke dalam teori dekolonial oleh Mignolo dan Tlastanova (2006). Konsep ini bertujuan untuk menghadirkan pengetahuan lain akibat kekerasan epistemik oleh modernitas/kolonialitas yang ditunjang Eurosentrisme. *Border thinking* bertujuan untuk menghadirkan cara-cara mengetahui, berpikir, dan menjadi yang mengakui pengalaman kolonial, meliputi eksklusi budaya, ekonomi, politik, sosial, dan luka-luka yang ditinggalkan. *Border thinking* menjadi upaya menghadirkan ‘kebenaran pluriversal’ serta sebagai kemungkinan untuk memikirkan kembali geopolitik dan politik tubuh pengetahuan (Mignolo dan Tlastanova, 2006).

Border thinking mencoba untuk menghadirkan *border epistemology*, cara-cara mengetahui, berpikir, menjadi yang berakar dari pengalaman serta perspektif yang dieksklusi kolonialitas. Penghadiran *border epistemology* mensyaratkan kesadaran imigran (*immigrant consciousness*), yaitu kesadaran individu atau kelompok sebagai tubuh yang hidup di sistem sosial dan budaya berbeda serta tereksklusi. Akibat kesadaran tersebut, mitos universal kemudian diputus dan mengganti orientasinya ke ‘kebenaran universal’ yang mengakui berbagai realitas dapat hidup berdampingan.

Kehadiran *border epistemology* berdampak memutus tautan (*delinking*) dari kolonialitas sekaligus menautkan kembali (*relinking*) kepada *border epistemology*. Untuk dapat *delinking* dari kolonialitas, seseorang atau kelompok perlu menjadi ‘tidak patuh secara epistemik (*epistemic disobedience*)’. Ketidakpatuhan epistemik akan melahirkan pilihan-pilihan lain yang berakar pada pengalaman di luar pengetahuan dominan. Kemudian, mengganti orientasi berpikir dan mengalami dunia sebagai ‘kebenaran pluriversal’ yang mengakui berbagai realitas dapat hidup berdampingan (Mignolo, 2011c).

1.7.1.3. Estetika Dekolonial

Estetika dekolonial pertama kali dikenalkan oleh Alchinte (2003) dan dikembangkan oleh para pemikir dekolonial Transnational Decolonial Institute. Estetika dekolonial merujuk pada kolonialitas terhadap indera dan persepsi, misal normativitas visual (arsitektur, seni dan media), auditori (musik dan bahasa, narasi sejarah), olfaktori (aroma dan bau), dst. Indera dan persepsi adalah aspek fundamental untuk mengalami dunia. Dengan demikian, estetika dekolonial bertujuan untuk mendekolonisasi indera dan persepsi serta cara-cara kita mengalami dunia (Mignolo, et. al., 2011). Estetika dekolonial berkaitan dengan aspek seperti budaya dan alam yang juga mengalami kolonialitas (Mignolo dan Vazquez, 2013).

Estetika dekolonial menganjurkan untuk menelisik makna ‘estetika’. Kebudayaan Barat, melalui tulisan Immanuel Kant yang berjudul *Observations on the Beauty and the Sublime* (1767), telah membentuk makna ‘estetika’ sebagai kemampuan untuk mempersepsikan hal-hal indah nan agung dan kejeniusan artistik. Institusi seperti pasar seni, galeri, museum, *biennial* (pameran berskala internasional), atau akademi seni seringkali mempromosikan standar selera bagus (*good taste*) dan seni berestetika tinggi (*high art*). Teorisasi, institusionalisasi, hingga standarisasi estetika oleh Barat telah membentuk makna-makna yang dianggap universal tersebut.

Namun, ‘estetika’ dalam estetika dekolonial merujuk pada makna sebelum teorisasi Barat. Estetika adalah bahasa Yunani tentang kemampuan untuk merasakan dalam persepsi inderawi, adapun ‘estesis’ yang berarti proses persepsi dan pengalaman sensorik. Karenanya estetika (dari teorisasi Barat), atau akan digunakan istilah estetika modern, telah mengkolonisasi indera dan persepsi melalui normativitas keindahan atau keagungan. Normativitas ini kemudian menjadi salah satu cara pembedaan kebudayaan Barat sebagai yang lebih unggul dan yang lainnya inferior. Normativitas ini biasanya tertuang dalam kanon-kanon seni, yaitu pengaturan wacana dominan dari cara-cara mengalami dunia.

‘Estesis’ sejatinya tidak terbatas pada aktivitas dunia seni, melainkan atribut dasar manusia atau seluruh organisme hidup dalam mengindra dan mempersepsikan dunia. Estetika dekolonial menarik analisisnya berdasar

konsep sosiogenesis Fanon mengenai pengalaman indera. Fanon (...) menjelaskan bahwa *“saya adalah saya karena pandangan orang lain, dan orang lain itu adalah orang kulit putih”*. Sosiogenesis yang ditindaklanjuti oleh estetika dekolonial menunjukkan pengalaman subjek yang dirasialisasi, subjek yang terluka akibat pembedaan oleh manusia. Subjek yang terluka ini tidak selalu kelompok miskin atau subaltern, tetapi bisa siapa saja yang hidup dalam kekuasaan modern/kolonial sebab luka kolonial melintasi kelas sosial serta bersifat rasial dan patriarkal (Mignolo dalam Gaztambide-Fernandez, 2014).

Dengan demikian, estetika dekolonial bertujuan untuk menghadirkan kembali subjek dan pengetahuan dekolonial melalui pengalaman merasakan dan mempersepsikan dunia yang beragam, alih-alih hasil akhir seperti keindahan. Estetika dekolonial menjadi upaya dekolonisasi dalam/melalui praktik artistik, produksi pengetahuan, gerakan sosial, praktik keseharian, dan berbagai cara-cara mengalami dunia (Alchinte, 2003). Kolonialitas Barat telah menyingkirkan pengetahuan dan subjektivitas di luar Barat. Oleh karena itu, estetika dekolonial mengakui ‘luka-luka kolonial’ dan mencari ‘penyembuhan dekolonial’ melalui kehadiran kembali subjek dan pengetahuan kelompok yang telah diopresi secara historis (Mignolo dan Vazquez, 2013).

1.7.2. Definisi Operasional

1.7.2.1. Kolonialitas

Dalam penelitian ini, kolonialitas akan digunakan untuk membaca struktur dunia di hari ini yang menciptakan hierarki Utara/Selatan. Hierarki Utara/Selatan menurut Brandt (1980) menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kekayaan antara negara-negara maju di Utara dan berkembang di Selatan. Perbedaan ini bukan sekedar kondisi kontemporer, namun masih terus berkaitan dengan operasi kolonialitas yang tidak pernah berhenti sejak penaklukan Amerika pada abad ke-16. Kolonialitas juga akan digunakan untuk mensituasikan mengenai Konferensi Bandung dan warisan Spirit Bandung secara historis dan diskursif. Yaitu, himpitannya dengan fase kolonialitas yang terus direproduksi melalui proyek ekonomi global Amerika Serikat di tengah Perang Dingin dan perkembangannya hingga hari ini melalui globalisasi neoliberal. Di sisi lain, kolonialitas juga akan digunakan untuk melacak operasi kekuasaan kolonial dalam aktivitas kesenian untuk kemudian membicarakan upaya dekolonisasi sebagai warisan Konferensi Bandung melalui/dari aktivitas kesenian.

1.7.2.2. *Border Thinking*

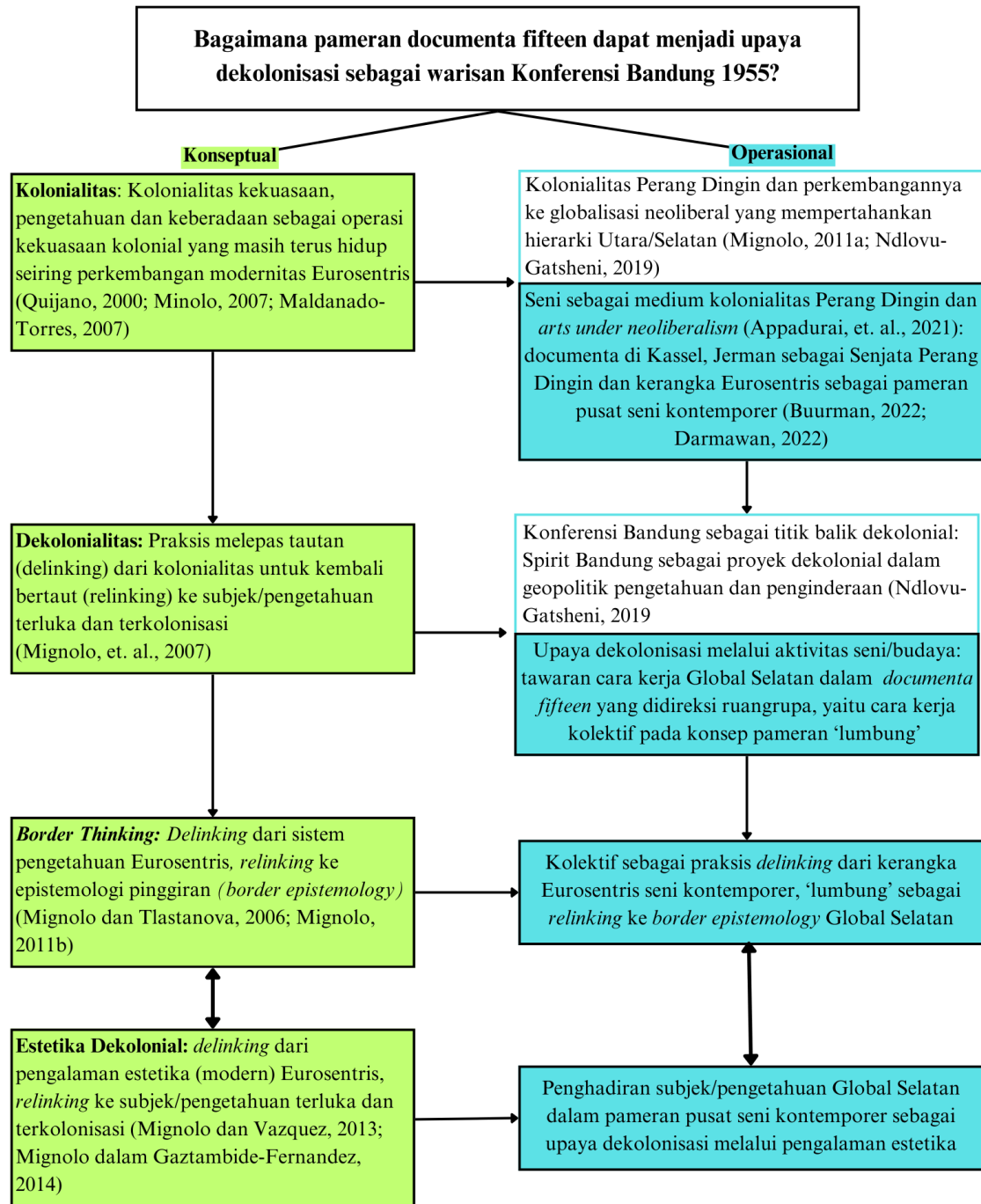
Border thinking digunakan untuk memosisikan Selatan sebagai perangkat pengetahuan dan pengalaman yang valid untuk mendekolonisasi warisan kolonial yang masih terus hidup, atau lebih tepat kolonialitas. Selatan

dalam hal ini dilihat lebih dari sekedar hitungan PDB per kapita, melainkan gagasan mengenai visi dunia yang melepaskan diri dari kolonialitas. *Border thinking* digunakan untuk memperluas makna Selatan. Bukan hanya dilihat dari indikator terukur, misal ekonomi dan geografis, melainkan juga pengalaman kolonialisme dan gagasan tentang solidaritas masyarakat global dekolonial. Selatan sebagai ide tentang solidaritas dekolonial berarti menyadari posisinya di batas-batas kolonialitas dan mencoba melepas tautan (*delinking*) untuk bertautan kembali (*relinking*) dengan subjek dan pengetahuan yang tereksklusi. Hal ini berarti menempatkan lagi imajinasi Selatan berdasar gagasan Dunia Ketiga warisan Konferensi Bandung dan solidaritas perjuangan anti-kolonial dan dekolonial lainnya.

Di sisi lain, *border thinking* juga digunakan untuk melihat keberlanjutan upaya dekolonisasi dalam *documenta fifteen*, khususnya tentang ide-ide kolektif dalam praktik lumbung sebagai konsep dan gagasan pameran. Kolektif maupun lumbung adalah pengetahuan yang khas di masyarakat agrikultur, masyarakat yang mengalami tak hanya kolonialisme tetapi juga kolonialitas akibat ekspansi kolonial dan industrialisasi. *Border thinking* digunakan untuk meninjau proses *delinking* dari kolonialitas melalui kehadiran konsep pameran berdasar pengetahuan Selatan.

1.7.2.3. Estetika Dekolonial

Estetika dekolonial digunakan untuk menganalisis muatan *documenta fifteen*. Khususnya tentang bagaimana muatan dekolonisasi dalam *documenta fifteen*. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, estetika dalam konsep ini bukanlah makna akhir seperti teorisasi Barat tentang keindahan dan keagungan. Estetika adalah cara-cara mengalami dunia. Estetika dekolonial menghadirkan luka-luka kolonial dan penyembuhannya melalui subjek dan pengetahuan global dekolonial. Dengan demikian, konsep ini akan digunakan untuk melihat bagaimana narasi-narasi selama pameran *documenta fifteen* merefleksikan solidaritas anti-kolonial dan dekolonial yang mengharapkan tatanan dunia lebih baik.



Gambar 1.2 Alur Berpikir Penelitian

Sumber: olahan peneliti

1.8. Argumen Penelitian

Penelitian ini berargumen bahwa Konferensi Bandung 1955 mewariskan kesadaran tentang kolonialitas yang terus hidup meskipun abad ke-20 diyakini sebagai periode dekolonisasi formal. Kolonialitas bertahan melalui hierarki global berbasis logika Eurosentris yang tercermin dalam ketimpangan ekonomi dunia Utara-Selatan. Namun, ketimpangan ini didasari oleh operasi kolonialitas yang tidak hanya di aspek politik-ekonomi, tetapi juga pengetahuan, subjektivitas, estesis masyarakat paskakolonial. Kolonialitas berangkat dari dan terus mendorong krisis-krisis global seperti rasisme, patriarki, maupun krisis ekologi.

Oleh karenanya, diperlukan dekolonisasi di berbagai bidang yang tak hanya terbatas pada pergeseran kekuatan ekonomi. Dekolonisasi pengetahuan, subjektivitas, atau estesis dapat dilakukan melalui aktivitas kesenian, dalam hal ini pameran *documenta fifteen*. Dengan menggunakan konsep *border thinking* dan estetika dekolonial, penelitian ini berargumen bahwa konsep pameran berdasar pengetahuan dunia Selatan, yaitu cara kerja kolektif dalam konseptualisasi praktik lumbung, dapat menjadi upaya menghadirkan pilihan lain di luar modernitas/kolonialitas. Kehadiran seniman dan kolektif dari Global Selatan dan pertemuan berbagai pengalaman spasial-kultural menjadi momentum kehadiran luka-luka kolonial dan membayangkan penyembuhan dekolonial untuk tatanan dunia yang lebih baik.

1.9. Metode Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif. Tiga fitur utama dalam penelitian kualitatif adalah pendekatan induktif antara teori dan penelitian, posisi epistemologis interpretivis yang menekankan pemahaman realita sosial melalui penyelidikan atas interpretasi individu-individu yang hidup dalam realita tersebut, serta posisi ontologis konstruksionis yang menekankan bahwa produk sosial adalah hasil dari interaksi antar-individu (Bryman, 2012). Di lain sisi, penelitian kualitatif turut menegaskan pemahaman berdasarkan subjek penelitian (*seeing through the eyes of people (being studied)*) serta menekankan pada konteks dan prosesnya.

1.9.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan dan memaparkan fenomena yang sedang terjadi di masyarakat (Moleong, 2007). Penelitian ini akan mencoba menjawab pertanyaan penelitian, yaitu bagaimana pameran *documenta fifteen* dapat menjadi upaya dekolonisasi sebagai warisan Konferensi Bandung 1955, khususnya melalui konsep pameran yang menyadari operasi kekuasaan kolonial dan kehadiran pilihan lain di dalamnya.

1.9.2. Situs Penelitian

Sebagai penelitian kualitatif bertipe eksplanatif, situs penelitian dikondisikan sehingga tidak ada latar tempat spesifik. Namun, sirkulasi situs penelitian ini adalah Kassel sebagai lokasi *documenta* dan ruang eksplorasi

kuratorial lumbung (melalui lumbung Kassel), Indonesia sebagai konteks kolektif dan eksplorasi praktik lumbung oleh ruangrupa dan anggota lumbung lainnya (lumbung Indonesia), serta lokalitas Global Selatan sebagai eksplorasi praktik lumbung (lumbung inter-lokal).

1.9.3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah documenta (baik sebagai institusi maupun pameran seni internasional), ruangrupa, dan seniman/kolektif lainnya yang tergabung dalam lumbung.

1.9.4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang dikumpulkan melalui studi literatur, wawancara, observasi, atau analisis dokumen.

1.9.5. Sumber Data

Sumber data penelitian ini adalah wawancara, arsip documenta, arsip lumbung, dan data-data tidak langsung, seperti rilisan jurnal, data pemerintah, berita media, dan seterusnya.

1.9.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi literatur. Wawancara digunakan untuk mengamati secara mendalam proses di balik kuratorial *documenta fifteen*. Selain itu, studi literatur

digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis historiografi *documenta*, kolektif, ruangrupa, dan konsep pameran/kuratorial *documenta fifteen*.

1.9.7. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis diskursus kritis (*critical discourse analysis*) sebagai teknik analisis data. Phillips dan Hardy (2002) menjelaskan bahwa analisis diskursus kritis menekankan peran diskursus—sebagai seperangkat teks yang berkesinambungan serta praktik-praktik produksi dan diseminasinya yang *menjadikan (bring into being)* sebuah objek—dalam memproduksi realita sosial dan menjadikannya nyata sehingga interaksi sosial tidak dapat dipahami secara menyeluruh tanpa memahami diskursus yang memberikan makna atasnya. Penelidikan diskursus harus ditelisik dalam relasinya dengan struktur-struktur sosial yang ada, termasuk di dalamnya relasi kuasa yang sedari awal menciptakan diskursus tersebut. Dalam analisis diskursus kritis, peneliti harus menelusuri bagaimana diskursus dikonstruksi dan dipertahankan keberadaannya dalam hubungannya dengan suatu fenomena (Bryman, 2012). Bryman juga menjelaskan bahwa diskursus tidak hanya menyajikan deskripsi atas kejadian-kejadian sosial, tetapi juga proses penciptaan makna yang berlangsung di dalamnya yang membentuk makna, bagaimana, mengapa, dan kapan”.

Berikutnya, analisis diskursus kritis akan digunakan untuk

meninjau struktur kekuasaan dalam *documenta* sebagai situs yang memproduksi makna. Selain itu, teknik analisis ini juga akan digunakan untuk meninjau proses diskursif dalam *documenta fifteen*.